

BAB I

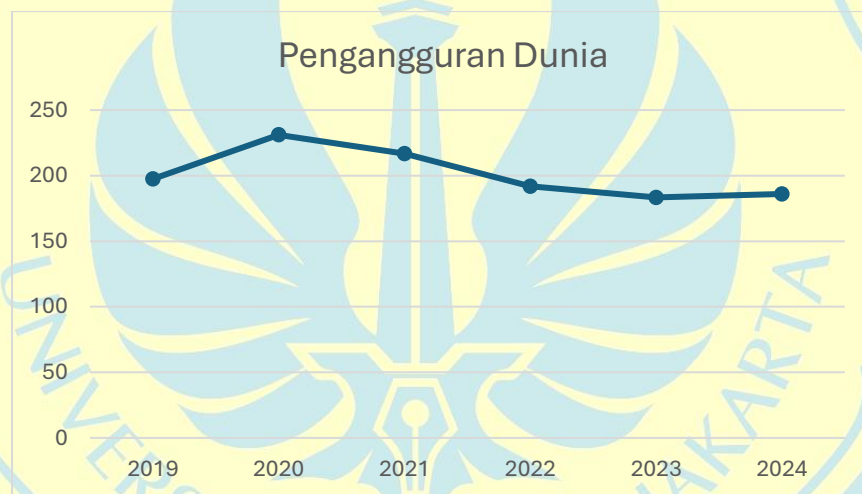
PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Penelitian

Pandemi covid-19 mengakibatkan beberapa sektor kehidupan mengalami perubahan yang signifikan. Kendati demikian, pemulihan perekonomian pasca pandemi Covid-19 telah berlangsung secara bertahap di berbagai negara dan menunjukkan tren positif terhadap pertumbuhan ekonomi global. Berdasarkan data dari *World Bank* melalui laporan *Global Economic Prospects* menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi global mengalami peningkatan menjadi 2,7 persen pada tahun 2024. Meskipun demikian, proses pemulihan ini masih dihadapi dengan berbagai persoalan, seperti gejolak geopolitik antarnegara, tekanan inflasi, dan kebijakan tarif perdagangan (World Bank, 2026). Dinamika tersebut dinilai belum cukup kuat mendorong percepatan pembangunan secara signifikan, terutama bagi negara-negara berkembang dan *emerging market* (EMDEs) yang masih menghadapi tantangan besar dalam menciptakan lapangan kerja dan menjaga momentum pertumbuhan.

Kualitas pertumbuhan ekonomi suatu negara seringkali diukur melalui kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja. Tingkat pengangguran yang masih relatif tinggi menjadi salah satu indikator bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya inklusif. Pada kondisi pasar tenaga kerja yang mendekati tingkat alami (*natural rate of employment*), tingkat pengangguran cenderung berada pada level yang relatif rendah yang ditentukan oleh karakteristik struktural pasar tenaga kerja (Mankiw, 2018). Dalam praktis

empiris di beberapa negara maju, kondisi pasar tenaga kerja yang mendekati tingkat alami dalam periode tertentu sering tercermin pada tingkat pengangguran yang relatif rendah. Data dari *International Labour Organization* (ILO) pada tahun 2025 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran global tidak mengalami penurunan signifikan bahkan terkesan stagnan dalam periode pasca pandemi. Laporan *World Bank* pada tahun 2025, tingkat pengangguran global pada tahun 2024 masih menetap pada angka 4,8% yang menandakan bahwa pengangguran tetap menjadi tantangan yang tertahan secara global.



Gambar 1. 1 Jumlah Pengangguran Dunia

Sumber: Data Statista (2025), diolah.

Secara umum, jumlah pengangguran mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2020 akibat terjadinya pandemi COVID-19, yaitu dari sekitar 187 juta jiwa pada tahun 2019 menjadi lebih dari 220 juta jiwa atau berkisar di 5,6% pada tahun 2019 menjadi 6,6% pada tahun 2020. Meskipun setelah itu angka pengangguran menunjukkan tren penurunan, penurunan tersebut hanya membawa kondisi kembali pada tingkatan yang hampir sama seperti periode

sebelum pandemi terjadi. Dengan kata lain, pemulihan pasar tenaga kerja global belum sepenuhnya menunjukkan perbaikan dan cenderung hanya mengembalikan kondisi pada periode sebelum terjadinya pandemi.

Fenomena pengangguran tidak hanya menimbulkan dampak ekonomi berupa penurunan pendapatan masyarakat, tetapi juga berdampak sosial seperti meningkatnya kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. *International Labour Organization (2023)* mengatakan bahwa tingginya tingkat pengangguran serta lemahnya penciptaan kerja layak dapat meningkatkan risiko kemiskinan serta memperburuk kerentanan sosial terutama pada negara – negara berkembang. Oleh karena itu, permasalahan pengangguran masih menjadi fokus utama dalam berbagai agenda pembangunan yang berkelanjutan, termasuk dalam agenda *Sustainable Development Goals (SDGs)* poin ke-8 yang menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi inklusif dan penciptaan kerja yang layak bagi semua orang (*United Nations, 2020*). Meskipun upaya global terus dilakukan, faktor-faktor struktural dan kebijakan ekonomi nasional tetap menjadi penentu utama dalam menekan angka pengangguran pada masing-masing negara.

Permasalahan pengangguran juga tercermin pada berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia yang masih menghadapi tantangan dalam mengatasi permasalahan pengangguran. Di kawasan ASEAN (*Association of Southeast Asian Nation*), Indonesia merupakan negara dengan tingkat pengangguran tertinggi pertama dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya

dengan tingkat pengangguran sebesar 4,85 persen atau sekitar 7,5 juta jiwa per Agustus 2025 (Badan Pusat Statistik, 2025).



Gambar 1. 2 Pengangguran Terbuka Indonesia 2019 – 2025

Sumber: Data.Id (2025), data diolah dari Badan Pusat Statistik

Kondisi pengangguran di Indonesia secara nasional menunjukkan tren penurunan dalam beberapa periode ke belakang. Data dari Badan pusat Statistik memperlihatkan bahwa jumlah maupun tingkat pengangguran terbuka di Indonesia cenderung mengalami penurunan pada periode setelah pandemi. Namun demikian, meskipun tren penurunannya terus berlanjut, perkembangan tingkat pengangguran tersebut masih berfluktuasi sehingga belum menunjukkan kondisi yang sepenuhnya stabil. Jumlah penduduk yang menganggur juga masih relatif tinggi seiring dengan terus bertambahnya jumlah angkatan kerja. Jumlah pengangguran yang masih relatif tinggi secara nasional menunjukkan terdapat permasalahan struktural yang mendalam, terutama berkaitan dengan kemampuan perekonomian dalam menyerap tenaga kerja secara optimal.

Penurunan jumlah pengangguran secara nasional di Indonesia tidak terjadi secara merata di seluruh provinsi. Data yang didapat dari Badan Pusat Statistik, menunjukkan masih terdapat beberapa provinsi yang bertolak belakang dengan kondisi nasional, yaitu berupa ketimpangan keadaan pasar tenaga kerja antar provinsi. Perbedaan jumlah pengangguran antar provinsi di Indonesia masih sangat mengalami perbedaan. Pada saat mayoritas provinsi mengalami tren penurunan yang signifikan, beberapa provinsi justru menunjukkan tingkat kenaikan jumlah pengangguran maupun penurunan jumlah pengangguran yang tidak signifikan.

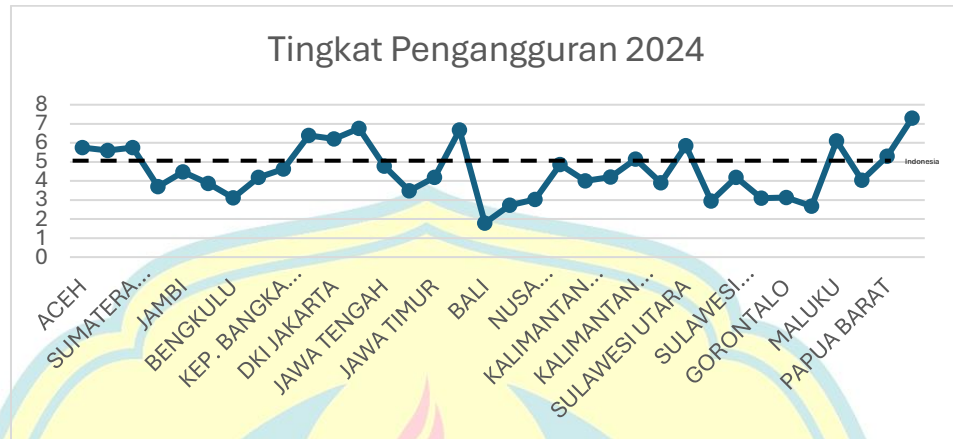


Gambar 1. 3 Pengangguran Provinsi Periode 2023-2024 (Juta Jiwa)

Sumber: (Kementerian Ketenagakerjaan, 2025), diolah.

Ketimpangan tersebut tidak hanya terlihat dari segi jumlah penduduk yang menganggur, melainkan tercermin dari presentase tingkat pengangguran terbuka pada masing – masing daerah. Berdasarkan data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2024 yang tertera pada Gambar 1.3, terlihat bahwa sejumlah provinsi masih memiliki presentase tingkat pengangguran yang jauh di atas rata rata nasional Indonesia. Papua mencatat TPT tertinggi yaitu sebesar

7,33 persen dan diikuti oleh provinsi lainnya seperti Jawa Barat, Kepulauan Riau dan DKI Jakarta.



Gambar 1. 4 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Provinsi di Indonesia

Sumber: Badan Pusat Statistik (2025), diolah penulis

Perbedaan kondisi pengangguran ini menunjukkan bahwa kondisi pasar tenaga kerja di Indonesia bersifat heterogen. Perbedaan ini yang kemudian mengindikasikan bahwa proses penyerapan tenaga kerja secara regional di Indonesia belum berjalan secara merata dan masih dipengaruhi oleh karakteristik struktural masing-masing daerah. Perbedaan dalam kondisi pengangguran tidak semata-mata ditentukan oleh kondisi pasar tenaga kerja, melainkan disebabkan oleh berbagai faktor ekonomi dan kebijakan yang berbeda di setiap daerah (Syawalludin et al., 2025). Beberapa faktor yang berkaitan dengan pengangguran diantaranya ekspor, belanja pemerintah dan pembangunan TIK. Dalam sistem perekonomian terbuka, ekspor merupakan salah satu komponen penting yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sekaligus perluasan kesempatan kerja. Peningkatan aktivitas ekspor akan meningkatkan permintaan agregat, yang kemudian mendorong

bertambahnya kebutuhan tenaga kerja sehingga pada akhirnya dapat menurunkan tingkat pengangguran (Putri et al., 2023).

Hubungan antar ekspor dan pengangguran tidak selalu menunjukkan pola yang konsisten. Pada beberapa kondisi, peningkatan ekspor tidak diikuti oleh penurunan pengangguran secara signifikan. Kondisi tersebut dapat terjadi apabila struktur ekspor suatu negara lebih didominasi oleh industri padat modal yang cenderung membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah relatif sedikit (Harismahyanti A. & Nur'eni, 2025). Di samping itu, ketidaksesuaian antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri yang berorientasi ekspor turut menyebabkan peningkatan ekspor tidak selalu diikuti oleh penurunan tingkat pengangguran. Oleh karena itu, kenaikan nilai ekspor belum tentu mampu mengurangi pengangguran apabila tidak didukung oleh struktur ekonomi yang lebih inklusif serta kualitas sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Seperti temuan yang dilakukan oleh Sahrul et al (2023) yang mengemukakan bahwa ekspor tidak memberikan pengaruh terhadap pengangguran di Indonesia dalam jangka pendek. Namun, penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam jangka panjang ekspor justru mampu memberikan kontribusi terhadap penurunan jumlah pengangguran. Temuan lain yang dilakukan oleh Sari et al (2022) menggunakan data panel pada 18 provinsi Indonesia dan menemukan bahwa guncangan ekspor tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran dalam jangka pendek.

Perspektif lain yang dikemukakan oleh Harismahyanti A. & Nur'eni (2025) menegaskan bahwa ketika struktur ekspor suatu negara didominasi oleh komoditas yang padat modal, maka peningkatan nilai ekspor tidak secara langsung menurunkan jumlah pengangguran. Liu et al (2022) dalam studinya pada 45 negara anggota OIC memperkuat hal tersebut, bahwa pengaruh ekspor terhadap pengangguran bersifat kondisional tergantung dengan tingkat pendapatan negara tersebut. Di negara yang memiliki pendapatan rendah, ekspor berpengaruh negatif terhadap pengangguran pada saat komposisi eksportnya mampu menyerap tenaga kerja.

Dalam konteks Indonesia, kegiatan ekspor selama lima tahun ke belakang mulai dari 2020 – 2024 secara berat memiliki tren yang positif, dimana hal ini memiliki arti bahwa permintaan akan barang ekspor Indonesia tercatat stabil. Di sisi lain, dari segi nilai terdapat fluktuasi nilai ekspor yang terjadi pada periode 2020 – 2024 (Badan Pusat Statistik , 2025). Komoditas ekspor yang dilakukan masih didominasi oleh bahan bakar mineral, bijih logam dan juga nikel yang bersifat *capital-intensif* dan *resource-intensive*.

Ketimpangan kinerja ekspor yang besar antar provinsi di Indonesia juga menyebabkan dinamika nilai ekspor suatu provinsi tidak selalu mencerminkan kondisi pasar tenaga kerja di wilayah tersebut secara langsung. Provinsi yang memiliki kinerja ekspor rendah tidak langsung mencerminkan memiliki pengangguran yang tinggi, begitu pula sebaliknya. Hal ini dikarenakan penyerapan tenaga kerja juga dipengaruhi oleh faktor faktor domestik lainnya (Sahrul et al., 2023).

Kebijakan fiskal pemerintah melalui belanja pemerintah juga menjadi instrumen penting dalam upaya mengatasi masalah pengangguran. Belanja pemerintah memiliki peranan penting dalam menjaga stabilitas perekonomian, meningkatkan pertumbuhan perekonomian eksklusif dan mengurangi pengangguran (Mutiar et al., 2024). Secara teoritis, pengalokasian belanja yang ekspansif pada sektor produktif, diharapkan mampu menciptakan *multiplier effect* atau efek pengganda yang mendorong aktifitas perekonomian. Semakin besar anggaran yang dialokasikan ke sektor produktif, semakin besar pula efek pengganda yang tercipta. Kondisi tersebut akan mendorong peningkatan aktivitas ekonomi, memperluas kesempatan kerja dan pada akhirnya berkontribusi dalam menurunkan tingkat pengangguran (Nursafitri & Yudha, 2020).

Studi empiris yang dilakukan oleh Saraireh (2020) pada negara Yordania, mengemukakan bahwa peningkatan belanja pemerintah sebesar 1 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) mampu menurunkan tingkat pengangguran sebesar 0,43 poin persentase dalam jangka panjang. Soukaina (2023) menemukan bahwa peningkatan belanja pemerintah di 16 Negara Kawasan Euro justru memiliki hubungan positif dengan tingkat pengangguran. Setiap kenaikan pengeluaran publik sebesar 1 persen berpotensi meningkatkan pengangguran sekitar 0,05 hingga 0,07 persen. Temuan ini mengindikasikan bahwa belanja pemerintah tidak selalu efektif dalam menurunkan pengangguran, khususnya apabila peningkatan pengeluaran tidak diikuti oleh

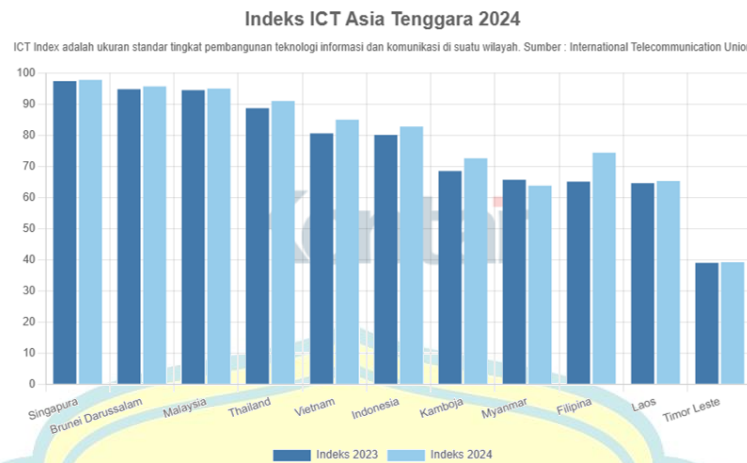
efisiensi alokasi anggaran serta dukungan kebijakan yang mampu mendorong aktivitas investasi dan penciptaan lapangan kerja.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan Indonesia pada tahun 2024, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp3.350,3 triliun, meningkat dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp3.121,9 triliun. Kenaikan realisasi belanja tersebut mencerminkan upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong aktivitas produksi di berbagai sektor. Namun, kondisi tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan dinamika belanja pemerintah di tingkat provinsi. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) Kementerian Keuangan melalui portal data APBD tahun 2024, realisasi belanja pemerintah provinsi menunjukkan perbedaan yang cukup besar antarwilayah, baik ditinjau dari besarnya anggaran yang direalisasikan maupun komposisi alokasi penggunaannya.

Dalam era digital saat ini, pembangunan teknologi, informasi dan komunikasi berkembang sangat cepat dan dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sarana untuk melakukan kegiatan sehari-harinya. Menurut *International Telecommunication Union (ITU)*, adanya pembangunan yang terfokus dalam bidang infrastruktur telekomunikasi berkontribusi pada peningkatan teledensitas, yang dimana dapat merepresentasikan tingkat konektivitas penduduk di berbagai negara. Pembangunan teknologi, informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk pada sektor ekonomi, terutama berkaitan dengan ketenagakerjaan (Cahyaningtyas, 2023).

Pembangunan TIK yang terus berkembang membawa transformasi terhadap pola kerja, komunikasi, dan interaksi manusia dalam kegiatan ekonomi (Dubois et al., 2024). Peningkatan pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) tidak hanya mendorong terciptanya berbagai peluang kerja baru, tetapi juga dapat meningkatkan efisiensi operasional di berbagai sektor usaha. Disisi lain, pembangunan dan kemajuan TIK juga membawa tantangan tersendiri, akibat terjadinya otomatisasi dan penggunaan mesin pada beberapa sektor yang berpotensi menggantikan peran tenaga kerja manusia, sehingga dapat memunculkan bentuk baru pengangguran struktural apabila keterampilan pekerja tidak sejalan dengan kemajuan teknologi (Rosadi & Tomy, 2025).

Di Indonesia, keberhasilan pembangunan TIK dapat diukur menggunakan suatu indeks, yaitu Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) (Badan Pusat Statistik, 2025). Pembangunan TIK di Indonesia dalam beberapa tahun kebelakang terus mengalami kenaikan. Data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (2025), nilai IP-TIK Indonesia pada tahun 2024 mencapai 6,02 dari skala 0-10, meningkat dari tahun 2023 yang hanya pada angka 5,90 dan 2022 sebesar 5,86.



Gambar 1. 5 Indeks Pembangunan TIK Negara-Negara ASEAN

Sumber: Pusat Data Kontan (2025)

Meskipun nilai IP-TIK Indonesia terus mengalami kenaikan di setiap tahunnya, namun Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Indonesia saat ini menduduki tingkat ke-6 dan tertinggal dibandingkan lima negara ASEAN lainnya. Hal ini tentunya cukup menjadi masalah, karena bisa saja ketertinggalan tersebut mencerminkan belum optimalnya pemanfaatan TIK secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2025), nilai Indeks Pembangunan TIK (IP-TIK) tahun 2024 menunjukkan bahwa hanya beberapa provinsi yang memiliki nilai indeks di atas rata-rata nilai indeks secara nasional.

Pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Indonesia hingga saat ini masih memperlihatkan adanya kesenjangan, di mana daerah perkotaan dan wilayah barat Indonesia cenderung memiliki kondisi pembangunan TIK yang lebih baik dibandingkan wilayah timur Indonesia. Sebagai contoh, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bali yang saat

ini merupakan provinsi dengan IP-TIK tertinggi di Indonesia dan memiliki infrastruktur digital yang relatif lengkap, akses internet yang luas, serta tingkat literasi digital masyarakat yang tinggi. Sebaliknya, provinsi seperti Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Barat yang masih mencatat nilai IP-TIK di bawah rata – rata nasional dan termasuk dalam kelompok provinsi dengan IP-TIK terendah di Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2025). Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pembangunan TIK belum berlangsung secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Akibatnya, daerah yang memiliki keterbatasan akses terhadap teknologi cenderung menghadapi peluang ekonomi dan kesempatan kerja yang lebih sempit dibandingkan wilayah yang telah berkembang secara digital.

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa permasalahan pengangguran di Indonesia tidak hanya bersifat agregat, tetapi juga menunjukkan perbedaan dinamika antar provinsi. Penurunan tingkat pengangguran secara nasional belum sepenuhnya mencerminkan kondisi pada tingkat provinsi, mengingat masih ditemukan provinsi yang mengalami kenaikan maupun penurunan secara tidak signifikan. Pengaruh ekspor, belanja pemerintah daerah dan pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap pengangguran masih menunjukkan hasil yang beragam dan inkonsisten.

Studi empiris yang telah dilakukan sebelumnya telah mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi pengangguran, sebagian besar masih berfokus pada level nasional maupun lintas negara, sehingga belum sepenuhnya mampu

menjelaskan dinamika pengangguran pada tingkat regional, khususnya di Indonesia yang memiliki karakteristik wilayah yang heterogen. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengkaji pengaruh ekspor, belanja pemerintah daerah serta pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap pengangguran terbuka dengan menggunakan data seluruh provinsi di Indonesia. Analisis dilakukan secara menyeluruh guna dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai faktor – faktor yang memengaruhi pengangguran terbuka pada tingkat provinsi.

1.2. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya, peneliti merumuskan beberapa pertanyaan berikut yang nantinya akan dicari jawabannya dalam penelitian ini:

- 1) Bagaimana pengaruh Ekspor terhadap Pengangguran Terbuka pada Provinsi di Indonesia
- 2) Bagaimana pengaruh Belanja Pemerintah Daerah terhadap Pengangguran Terbuka pada Provinsi di Indonesia
- 3) Bagaimana pengaruh Pembangunan Teknologi, Informasi - Komunikasi terhadap Pengangguran Terbuka pada Provinsi di Indonesia

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan pada bagian sebelumnya, maka tujuan dari penulisan skripsi ini diantaranya yaitu:

- 1) Mengetahui pengaruh Ekspor terhadap Pengangguran Terbuka pada Provinsi di Indonesia

- 2) Mengetahui pengaruh Belanja Pemerintah daerah terhadap Pengangguran Terbuka pada Provinsi di Indonesia
- 3) Mengetahui pengaruh Pembangunan Teknologi, Informasi - Komunikasi terhadap pengangguran Terbuka pada Provinsi di Indonesia

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terkait dengan topik penelitian ini. Manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, diantaranya:

- a. Berkontribusi pada pengembangan ilmu ekonomi khususnya dalam bidang ketenagakerjaan, ekonomi regional dan juga ekonomi pembangunan.
- b. Penelitian ini berupaya memperluas literatur dengan memberikan bukti empiris mengenai keterkaitan antara ekspor, belanja pemerintah daerah dan pembangunan TIK dengan pengangguran dalam konteks provinsi di Indonesia.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas topik serupa.

2) Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya:

- a. Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dalam perumusan kebijakan ekonomi khususnya berkaitan dengan strategi penurunan pengangguran terbuka bagi para pemangku kepentingan
- b. Penelitian ini diharapkan menjadi landasan bagi para pemangku kepentingan untuk mengevaluasi dan mengoptimalkan alokasi belanja serta memperkuat kapasitas penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan TIK dan perkembangan sektor ekspor agar lebih mampu menciptakan kesempatan kerja
- c. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji masalah pengangguran dan variabel – variabel yang mempengaruhinya.

